

## ABSTRAK

Pajak adalah kewajiban daripada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman dan ditetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan jasa. Sebagai sumber utama penerimaan negara, maka pajak perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dengan kemampuan sendiri dapat terwujud berdasarkan prinsip kemandirian.

Semakin banyaknya Wajib Pajak maka akan semakin besar pula pemasukan pajak yang diterima. Tetapi dalam kenyataannya banyak Wajib Pajak yang masih menunggak pembayarannya. Dan ini sudah menjadi keharusan bagi para aparat perpajakan untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak

Pengujian statistik yang digunakan adalah pengujian statistik Non-Parametrik yaitu metode Rank Spearman dengan menggunakan prosedur komputerisasi SPSS. Berdasarkan hasil uji hipotesis Non-Parametrik Rank-Spearman, diperoleh hasil Sig sebesar 0,015. dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% (0.05) berarti  $Sig < \alpha$ , maka  $H_0$ : ditolak dan  $H_1$ : diterima. Itu berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penagihan pajak terutang dan pencairan pajak tertunggak. Penagihan pajak yang berjalan dengan baik akan meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak. Apabila penerimaan tunggakan pajak dapat meningkat maka akan meningkatkan penerimaan tagihan pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Dalam hal penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi masih terdapat beberapa hambatan yang menimbulkan tunggakan pajak. Peranan penagihan yang baik berpengaruh besar terhadap pencairan pajak yang tertunggak. Sehingga diperlukan suatu koordinasi yang baik terutama dalam hal pelayanan dan prosedur untuk menciptakan penagihan pajak yang aman dan lancar.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa apabila Kantor Pelayanan Pajak Cimahi ingin mengurangi pajak yang tertunggak, maka penagihan terhadap pajak terutang harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi Wajib Pajak agar para Wajib Pajak mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajibannya.dalam membayar pajak.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Rerangka Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Lokasi Penelitian.....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Definisi Pajak.....	16
2.1.1 Pengertian Pajak.....	16
2.1.2 Fungsi Pajak.....	18
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung.....	20
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	21

2.1.6	Asas Pemungutan Pajak.....	22
2.1.7	Sistem Pemungutan Pajak.....	23
2.1.8	Stelsel Pajak.....	24
2.1.9	Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.....	25
2.1.10	Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
2.1.11	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	26
2.2	Pajak Penghasilan.....	28
2.2.1	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
2.2.2	Pajak Penghasilan Pasal 22.....	28
2.2.3	Pajak Penghasilan Pasal 23.....	29
2.2.4	Pajak Penghasilan Pasal 24.....	29
2.2.5	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	29
2.3	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.....	30
2.3.1	Dasar Pengenaan Pajak.....	30
2.3.2	Nomor Pokok Wajib Pajak.....	30
2.3.3	Laporan dan Pengukuhan PKP.....	31
2.3.4	Surat Pemberitahuan (SPT).....	31
2.3.5	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran.....	34
2.3.6	Surat Tagihan Pajak.....	34
2.3.7	Surat Ketetapan Pajak.....	36
2.3.7.1	SKPKB.....	36

2.3.7.2	SKPKBT.....	37
2.3.8	Surat Paksa.....	38
2.3.9	Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	39
2.4	Pengertian Pajak Yang Tertunggak.....	42

### **BAB 3 OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Sejarah kantor Pelayanan Pajak Cimahi.....	43
3.2	Struktur Organisasi.....	43
3.3	Wilayah Kerja.....	44
3.3.1	Kabupaten Bandung .....	44
3.3.1.1	Letak geografis.....	44
3.3.1.2	Luas Wilayah.....	44
3.3.2	Kota Cimahi.....	47
3.3.2.1	Letak geografis.....	47
3.3.2.2	Luas Wilayah.....	47
3.4	Metode Penelitian.....	48
3.4.1	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4.2	Sumber Data.....	51
3.4.3	Rencana Pengumpulan Data.....	51
3.4.4	Rencana Analitis.....	51
3.4.5	Penetapan Variabel Peneliiuan.....	52

3.4.6	Hipotesis Statistik.....	53
3.4.7	Statistik Uji.....	53
3.4.8	Prosedur Pengolahan Data.....	53
3.4.9	Kriteria Ho Diterima atau Ditolak.....	53

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Proses Pelaksanaan Penagihan.....	57
4.2.	Urutan Tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	57
4.2.1.	Penerbitan Surat tegoran.....	58
4.2.2.	Penerbitan Surat Paksa.....	59
4.2.3.	Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.....	60
4.2.4.	Pencabutan Sita.....	65
4.2.5.	Pengajuan Permintaan Jadwal Waktu Dan Tempat Pelelangan.....	66
4.2.6.	Pengumuman Lelang.....	66
4.2.7.	Pembatalan Pengumuman Lelang.....	67
4.2.8.	Jangka Waktu Tindakan Pelaksanaan Penagihan.....	67
4.2.9.	Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus.....	68
4.3.	Peranan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak.....	69
4.4.	Pengaruh Penagihan Pajak	

Terhadap Pencairan Pajak Tertunggak.....	72
4.5. Hambatan Dalam Penagihan Pajak Terutang.....	74
4.6. Uji Hipotesis.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	.... 81

## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

### **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Penerimaan Tunggalan Dan Realisasi Pembayaran Bulan Januari 2004 s/d Bulan Agustus 2005.....	67
Tabel II	Perbandingan Persentase dan Rasio Penerimaan Tunggalan Dan Realisasi Pembayaran Pajak Bulan Januari 2005 s/d Bulan Februari 2006.....	68
Tabel III	Jumlah Tagihan Pajak dan Realisasi Penerimaan per Triwulan Dari Tahun 2000 s/d Tahun 2005.....	71

### **DAFTAR BAGAN**

Bagan I	Bagan Prosedur Penagihan Terhadap Tunggalan Pajak.....	10
---------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Tunggakan Pajak
2. Petunjuk Pengisian Daftar Tunggakan Pajak
3. Buku Pengawasan Penagihan
4. Petunjuk Pengisian Buku Pengawasan Penagihan
5. Tegoran
6. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus
7. Surat Paksa
8. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
9. Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan
10. Surat Perintah Melakukan Penyitaan
11. Berita Acara Pelaksanaan Sita
12. Disita (Surat Penyitaan)
13. Pencabutan Sita
14. Pemberitahuan Penyitaan Barang Tak Gerak Atas Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
15. Permintaan Jadwal Waktu Dan Tempat Pelelangan
16. Bentuk, Jenis, Dan Kode Formulir Yang Dipergunakan Untuk Melaksanakan Keputusan Tentang Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat
18. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak